

REALISASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPPTSP) KABUPATEN PINRANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	TARGET KINERJA						REALISASI				TOTAL REALISASI	HAMBATAN/PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	KET
				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV	TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV						
1.	Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja	Nilai LKIP	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Pengukuran Kinerja belum dilakukan secara berjangka sehingga data kinerja belum dapat diandalkan.</p> <p>Belum maksimalnya Penilaian Kinerja sehingga review belum dapat dilakukan secara berkala di internal Dinas PMPTSP</p> <p>Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran para staf Dinas PMPTSP dalam mengisi format evaluasi kinerja yang telah diberikan</p> <p>Belum ada rencana tindak lanjut agen perubahan</p>	<p>Melakukan Pengukuran Kinerja secara berjangka setiap bulan dan pertiwhulan sehingga target kinerja yang direncanakan dapat dievaluasi dan di monitoring dan terukur dalam setiap laporan</p> <p>Memonitoring pencapaian Target Kinerja mulai dari Es.II,IV dan Staf. Dan pencapaian target tersebut dilakukan dengan pemberian Reward dan Punishment bagi ASN di lingkup Dinas PMPTSP 4 kali setahun dan sistem pengendalian dan pemantauannya dengan cara evaluasi melalui SKP setiap bulan di aplikasi e Kinerja oleh bagian sekretariat.</p> <p>Melakukan Pengukuran Kinerja secara berjangka setiap bulan dan pertiwhulan sehingga target kinerja yang direncanakan dapat dievaluasi dan di monitoring dan terukur dalam setiap laporan</p> <p>Mengoptimalkan peran agen perubahan melalui implementasi rencana tindak dan monitoring dan evaluasi atas rencana tindak agen perubahan dengan keputusan kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu no. 800/19/DPMPPTSP/2022 tgl 13 Januari 2022 dan telah membuat rencana tindak agen perubahan dan dilakukan monev atas rencana aksi agen perubahan</p> <p>Menyusun rencana aksi berdasarkan road map reformasi birokrasi dengan telah dilaksanakan rapid penyesuaian re berdasarkan road map RB yg menghasilan SK Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu no.340/13/2022 tertanggal. 10 Januari 2022</p>	70,87
2.	Meningkatnya aspek legalitas Perizinan	Nilai Survey Kepuasan masyarakat (SKM) perizinan	86	-	-	-	86	-	-	-	-	94,86	94,86	<p>Masih ada Persyaratan Pelayanan yang sulit dijangkapi, oleh karena itu Persyaratan Pelayanan perlu di sederhanakan.</p> <p>Melaksanakan pelatihan terkait tatacara pelayanan pengisian secara online kepada pengguna layanan</p>	<p>Membuat Surat Keputusan Kepala Dinas Tim Penyusun SKM yang mempunyai tugas melakukan monitoring tentang pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat pada Dinas PMPTSP</p> <p>Menyusun rencana perbaikan-perbaikan pada unit pelayanan terutama untuk jenis pelayanan yang perlu ditingkatkan</p> <p>Membuat laporan hasil pelaksanaan monitoring survey Kepuasan Masyarakat</p> <p>Melakukan pembinaan aparaturne peningkatan pemahaman asas-asas pelayanan yang baik.</p>	<p>Membuat Surat Keputusan Kepala Dinas Tim Penyusun SKM yang mempunyai tugas melakukan monitoring tentang pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat pada Dinas PMPTSP</p> <p>Menyusun rencana perbaikan-perbaikan pada unit pelayanan terutama untuk jenis pelayanan yang perlu ditingkatkan</p> <p>Membuat laporan hasil pelaksanaan monitoring survey Kepuasan Masyarakat</p>	94,86
3.		Jumlah Investasi PMDN dan PMA (Perizinan Usaha)	2000	675	785	1787	670	1953	1973	2078	7801	7801	<p>Masih ada permasalahan penyelenggaraan pelayanan publik berbasis Elektronik karena keterbatasan sarana dan prasana</p> <p>Masih banyaknya izin yang masuk tidak sesuai dengan SP (Standar Pelayanan) yang telah ditetapkan sehingga perlu peningkatan pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat.</p> <p>Kurangnya sosialisasi terkait layanan di Mal Pelayanan Publik ke masyarakat</p> <p>Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang Standar Pelayanan</p>	<p>Melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) oleh petugas pelayanan MPP terkait Standar Pelayanan MPP</p> <p>Membentuk Tim Investment Award dalam rangka peningkatan dan pengembangan inovasi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pinrang</p> <p>Membenakan layanan Paspor dan layanan Taspas Mandiri di Mal</p> <p>Melaksanakan Bimtek RAJIN di Desa dan Kelurahan.Service Excellent Rajin Desa dan Kelurahan</p> <p>Mengembangkan system aplikasi perizinan dan investasi terpadu berbasis informasi dan teknologi (Apifkasi Rajin dan Slap Boss)</p>	<p>Melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) oleh petugas pelayanan MPP terkait Standar Pelayanan MPP</p> <p>Membentuk Tim Investment Award dalam rangka peningkatan dan pengembangan inovasi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pinrang</p> <p>Membenakan layanan Paspor dan layanan Taspas Mandiri di Mal</p> <p>Melaksanakan Bimtek RAJIN di Desa dan Kelurahan.Service Excellent Rajin Desa dan Kelurahan</p> <p>Mengembangkan system aplikasi perizinan dan investasi terpadu berbasis informasi dan teknologi (Apifkasi Rajin dan Slap Boss)</p>	7801	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	TARGET KINERJA				REALISASI				TOTAL REALISASI	HAMBATAN/PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	KET
				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV	TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV				
4.	Meningkatnya penanaman modal	Jumlah Proyek PMDN	2.351	559	635	575	562	1750	2350	2300	2650	9.350	<p>Perlu ada pendampingan dan pelatihan SDM sesuai kebutuhan kegiatan layanan perizinan dan non perizinan</p> <p>Masih ada beberapa perusahaan yang wajib LKPM belum menyampaikan laporan realisasi penanaman modal secara berkala</p> <p>Dampak lain dengan adanya kebijakan OSS, Pemerintah Daerah tidak memiliki akses untuk ikut serta UMOI dengan sistem perizinan mandiri (diutamakan sendiri oleh pelaku usaha) karena tidak melalui Loket Pendaftaran pada DPM-PTGP dan tidak terakomodir dan webform sistem OSS</p> <p>Masih kurangnya informasi melalui media elektronik dan strategi kepada investor terkait potensi sumber daya alam di Kabupaten Pinrang.</p> <p>Masih banyaknya regulasi dari pusat sehingga butuh waktu untuk penyesuaian baik dari segi pelayanan maupun dari pihak investor.</p> <p>Belum memadainya SDM yang kompeten maupun sarana dan prasarana yang berkualitas untuk pelayanan perizinan investasi dan bisnis</p> <p>Pajak dan insentif yang tidak mendukung</p> <p>Kurangnya pembinaan terkait rendahnya mutu tenaga kerja dalam hal pendidikan akan pengetahuan dan teknologi</p> <p>Kurangnya koordinasi antara pihak perusahaan dan instansi terkait dalam hal jumlah tenaga kerja yang aktif di perusahaan yang bemonor induk Berusaha</p> <p>Kurangnya koordinasi antara pihak perusahaan dan instansi terkait dalam hal jumlah tenaga kerja aktif yang terdapat di perusahaan yang bemonor induk Berusaha</p>	<p>Melakukan pelayanan perizinan sistem elektronik dan pemantauan pemenuhan komitmen di Kecamatan</p> <p>Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait pengisian LKPM secara mandiri dan online</p> <p>Membentuk Tim kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan kegiatan usaha dari pelaku usaha</p> <p>Melakukan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja terkait jumlah tenaga kerja aktif yang terdapat di perusahaan yang bemonor induk Berusaha</p>	
5.	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN- Rupiah)	2.042.064.013.875	510.516.003.494	510.516.003.464	510.516.003.494	510.516.003.493	543.812.500.000	543.812.500.000	543.812.500.000	543.812.500.000	2.175.250.000.000	<p>Masih banyaknya perusahaan yang wajib LKPM belum menyampaikan laporan realisasi penanaman modal secara berkala</p>	Melaksanakan pendampingan OSS dan LKPM	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	TARGET KINERJA				REALISASI				TOTAL REALISASI	HAMBATAN/PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	KET	
				TRI.I	TRI.II	TRI.III	TRI.IV	TRI.I	TRI.II	TRI.III	TRI.IV					
				Rp 510.518.003.494	Rp	-	Rp 2.042.064.013.975									
		Nilai Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA - US\$)	Rp 151.864.303	\$ 37.873.598	37.873.598	37.873.598	37.873.598	16.742.554	5.990.463	5.990.463	5.990.463	23.961.851		Kurangnya SDM yang mendaftarkan perusahaan dalam penginputan LKPM online Masih banyaknya perusahaan yang wajib LKPM belum menyampaikan laporan realisasi penanaman modal secara bertahap. Adanya perubahan regulasi dari pusat tentang undang-undang cipta kerja sehingga butuh waktu untuk penyelesaian bagi perusahaan PMA Kurangnya pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemantauan dan pengawasaan investasi di perusahaan PMA.	Melaksanakan Bimtek/soalialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko, melaksanakan pendampingan OSS dan LKPM dan lisensi video conference Membentuk tim pengawasaan dan laporan evaluasi berusaha PMDN dan PMA Mengevaluasi kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan kegiatan usaha dari pelaku usaha Membentuk Tim kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan kegiatan usaha dari pelaku usaha Melanjutkan pengembangan Inovasi JABAT ERAT yang merupakan paket kerjasama antara investor PMA dan PMDN dengan Perusahaan UMKI.	

Pinnang, 30 Desember 2023

Kepala Dinas PMA/PTSP

